

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian mengenai penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan di Kota Padang tahun 2020 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah terbentuk kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana Kota Padang yaitu Perda No.03 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana di Kota Padang, SK Kadinkes No.443/SK/DKK Padang/X/2018 tentang pembentukan klaster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana Kota Padang, serta SOP dan rencana kontijensi Kota Padang. Untuk fasilitas kesehatan dan SDM sudah terpenuhi secara umum namun masih dirasa kurang untuk jumlah bidan dan ketenagaan PSC di Kota Padang.
2. Perencanaan peningkatan kapasitas SDM sudah dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pelatihan SDM penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana belum terjadwal dan merata keseluruh tenaga kesehatan di Puskesmas. Data tenaga kesehatan yang siap dimobilisasi tidak ada *contact person* yang bisa dihubungi apabila terjadi bencana. Koordinasi Dinas Kesehatan dan BPBD berjalan dengan baik sebelum, saat dan sesudah bencana.
3. Terjadi peningkatan pemenuhan indikator kapasitas penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 18 indikator. Penyebab rendahnya pencapaian indikator penguatan kapasitas tahun 2017 disebabkan oleh beberapa factor diantaranya : system penilaian yang hanya menggunakan kuisioner, pengetahuan petugas mengisi kuisioner

kurang, dan mutasi pemegang program yang terlalu cepat. Adapun kendala yang masih dirasakan saat ini dalam penguatan kapasitas kebencanaan bidang kesehatan adalah kurangnya jumlah petugas kesehatan respon cepat kedaruratan PSC dan jumlah bidan di Kota Padang , pelatihan yang masih tidak konsisten dan tidak merata ke seluruh petugas kebencanaan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan di Kota Padang tahun 2020, ada beberapa saran dan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Padang dan Kementerian Kesehatan RI sebagai Berikut:

- a. Kepada Dinas Kesehatan Kota Padang
  1. Membuat penanggulangan bencana bidang kesehatan di Kota Padang serta sosialisasi peraturan dan SOP kepada petugas kesehatan di Puskesmas yang dilakukan secara berkala, dibagikan ke internet agar mudah diakses oleh seluruh petugas kesehatan, sehingga pelaksanaan kedaruratan dapat dimanajemen dengan baik.
  2. Pengoptimalan tenaga kesehatan yang ada dengan pemberian *reward* kepada tenaga kesehatan kebencanaan di Puskesmas maupun tenaga *Public Savety Center* berupa penghargaan, bonus, atau kenaikan pangkat.
  3. Diharapkan dalam pelaksanaan pelatihan petugas kesehatan kegawatdaruratan di Kota Padang lebih ditingkatkan frekuensinya dan konsisten dalam pelaksanaannya, pelatihan sebaiknya merata ke seluruh petugas kesehatan kebencanaan sehingga tidak ada *miss* informasi terkait kebencanaan bidang kesehatan.

4. Dalam pengisian kuisisioner oleh Dinas Kesehatan Kota Padang perlu memperhatikan kembali jawaban dan lampiran dalam pengisian kuisisioner secara lengkap dan rinci, serta harus sesuai dengan profil Dinas Kesehatan Kota Padang agar tidak ada lagi bias data atau ketidaksesuaian data sesungguhnya dengan hasil penilaian oleh Kementerian Kesehatan RI.

b. Kepada Kementerian Kesehatan RI

1. Disarankan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memperbaiki system dalam pelaksanaan penilaian kapasitas Kab/Kota rawan bencana dengan melakukan dua tahapan penilaian, yaitu dengan kuisisioner atau wawancara dan penilaian secara langsung ke lapangan untuk melihat apakah data yang di input sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga didapatkan keutuhan data yang saling melengkapi.



